

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wabah virus *corona* (SARS-CoV-2) atau lebih dikenal dengan sebutan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bermula dari Wuhan di Cina sudah melanda seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali Indonesia sejak 2020 (Prawoto *et al.*, 2020). Virus ini telah dikonfirmasi sebagai pandemi oleh badan kesehatan dunia yakni *World Health Organization (WHO)* pada bulan Maret 2020, menurut penjelasan *WHO* pandemi *COVID-19* dinyatakan tergolong sebagai pandemi. Hal tersebut tidak dipatokan pada tingkat keganasan dari virus melainkan karena luasnya penyebaran korban yang teridentifikasi dengan *COVID-19* ini ke seluruh penjuru dunia. Masyarakat yang dinyatakan positif *COVID-19* ditandai dengan gejala-gejala umum seperti batuk, pilek, sesak napas, demam, lemas atau kelelahan, dan sakit kepala. Hal tersebut akan semakin memburuk apabila pasien-pasien tersebut juga memiliki riwayat penyakit atau penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, jantung dan lainnya yang biasa disebut dengan istilah komorbid (Komite Penanganan *COVID-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2020).

Sejak awal *COVID-19* mewabah di Indonesia keberadaan virus ini sudah ditemukan memiliki 4 atau lebih jenis mutasi yakni B117, D614G, N439 dan E484K (Azizah, 2021). Beserta dengan tingkat mutasi virus yang semakin banyak dan bervariasi, hal tersebut membawa dampak pada peningkatan angka kasus yang terjadi. Pada April 2021 total kasus yang terkonfirmasi diperkirakan sudah mencapai lebih dari

150 juta kasus di seluruh dunia, dengan total sekitar 1,66 juta kasus terkonfirmasi di Indonesia. Angka tersebut menempatkan Indonesia di urutan ke-2 dengan tingkat kasus tertinggi *COVID-19* di Asia setelah India (*World Health Organization, 2020*). Dari total kasus yang terjadi di Indonesia per akhir bulan April 2021 yakni 1,66 juta kasus, sekitar 1,54 juta kasus telah dinyatakan sembuh, lebih dari 46 ribu kasus telah dinyatakan meninggal dunia dan sisanya masih dalam pengobatan atau isolasi mandiri. Tingkat kasus positif di Indonesia didominasi oleh masyarakat yang berusia produktif yakni masyarakat berusia 19-45 tahun dan 51% di antaranya perempuan.

Tabel 1.1
Kasus *COVID-19* di Indonesia

No	Provinsi	Jumlah Kasus	No	Provinsi	Jumlah Kasus
1	DKI Jakarta	406.205	18	Sulawesi Utara	15.638
2	Jawa Barat	277.553	19	Nusa Tenggara Timur	14.200
3	Jawa Tengah	183.027	20	Kepulauan Bangka Belitung	12.822
4	Jawa Timur	146.808	21	Sulawesi Tengah	12.125
5	Kalimantan Timur	68.136	22	Kalimantan Utara	11.702
6	Sulawesi Selatan	61.419	23	Kepulauan Riau	10.838
7	Banten	47.101	24	Aceh	10.814
8	Bali	44.236	25	Sulawesi Tenggara	10.396
9	Riau	42.698	26	Nusa Tenggara Barat	10.291
10	DI Yogyakarta	38.703	27	Papua Barat	8.879
11	Sumatera Barat	36.268	28	Maluku	7.515
12	Kalimantan Selatan	32.612	29	Kalimantan Barat	7.503
13	Sumatera Utara	29.198	30	Jambi	7.407
14	Papua	20.308	31	Bengkulu	6.630
15	Sumatera Selatan	20.068	32	Sulawesi Barat	5.443
16	Kalimantan Tengah	19.780	33	Gorontalo	5.355
17	Lampung	15.702	34	Maluku Utara	4.414

Sumber: Komite Penanganan *COVID-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021

Dari total kasus yang terkonfirmasi di Indonesia, angka tersebut masih terbagi ke dalam 34 provinsi, pada Tabel 1.1 menunjukkan Provinsi Jawa Barat berada di

peringkat ke 2 dengan angka tertinggi yakni 277.553 kasus atau lebih dari 16% dari total kasus yang terkonfirmasi. Selanjutnya perbandingan tingkat kasus yang sudah dinyatakan sembuh dengan total kasus yang terjadi, pada Tabel 1.2 perbandingan ini juga menunjukkan Provinsi Jawa Barat peringkat ke 2 tertinggi di antara 34 provinsi. Dengan tingkat kesembuhan yakni 0,1502 atau dalam persentase sama dengan 15,02% dari total kasus yang terjadi. Maka dapat diperkirakan total kasus yang telah dinyatakan sembuh di Provinsi Jawa Barat ada lebih dari 250 ribu kasus.

Tabel 1.2
Perbandingan Kasus Sembuh dengan Total Kasus COVID-19 di Indonesia

No	Provinsi	Kasus	No	Provinsi	Kasus
1	DKI Jakarta	0,2387	18	Nusa Tenggara Timur	0,0077
2	Jawa Barat	0,1502	19	Kepulauan Bangka Belitung	0,0073
3	Jawa Tengah	0,1003	20	Sulawesi Tengah	0,0068
4	Jawa Timur	0,0814	21	Papua	0,0068
5	Kalimantan Timur	0,0394	22	Kalimantan Utara	0,0067
6	Sulawesi Selatan	0,0361	23	Kepulauan Riau	0,0060
7	Banten	0,0267	24	Sulawesi Tenggara	0,0059
8	Bali	0,0253	25	Aceh	0,0059
9	Riau	0,0238	26	Papua Barat	0,0051
10	DI Yogyakarta	0,0214	27	Nusa Tenggara Barat	0,0048
11	Sumatera Barat	0,0207	28	Maluku	0,0043
12	Kalimantan Selatan	0,0181	29	Kalimantan Barat	0,0042
13	Sumatera Utara	0,0158	30	Jambi	0,0038
14	Sumatera Selatan	0,0111	31	Bengkulu	0,0036
15	Kalimantan Tengah	0,0105	32	Sulawesi Barat	0,0032
16	Lampung	0,0084	33	Gorontalo	0,0031
17	Sulawesi Utara	0,0080	34	Maluku Utara	0,0025

Sumber: Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021

Perbandingan terakhir ialah perbandingan tingkat kasus yang meninggal dunia dengan total kasus yang terkonfirmasi di Indonesia. Berbeda dengan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, hasil perbandingan pada Tabel 1.3 yakni tingkat kasus meninggal dunia, Provinsi Jawa Barat berada di peringkat 4 tertinggi. Perbandingan pada Tabel 1.3

menunjukkan angka kasus meninggal dunia di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,0023 atau sekitar 0,23%. Apabila dijadikan dalam satuan maka sekitar 3837 kasus meninggal dunia dikarenakan *COVID-19* terkonfirmasi di Provinsi Jawa Barat.

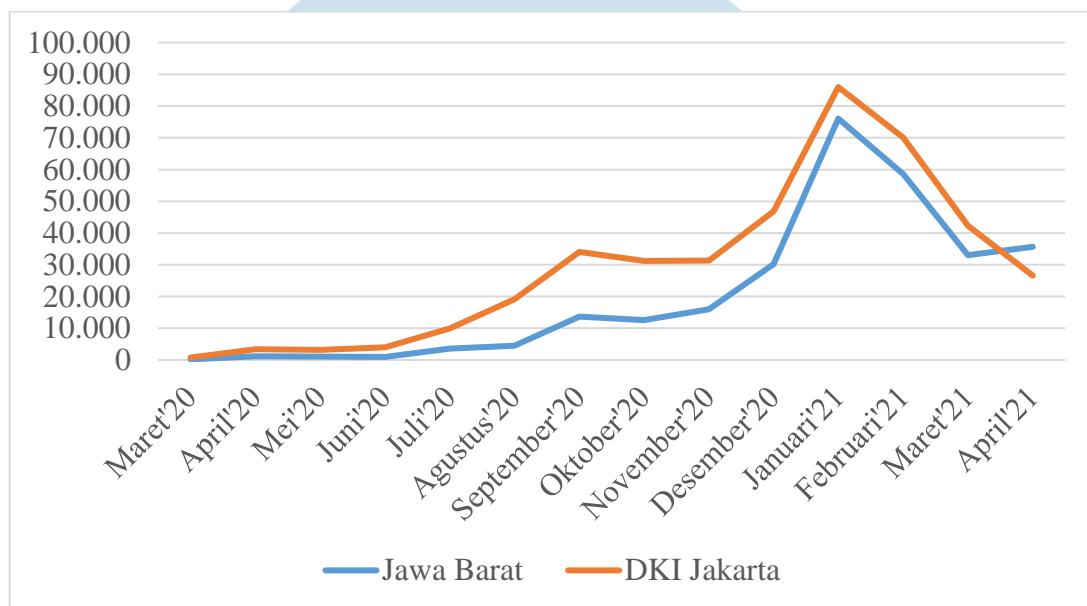
Tabel 1.3
Perbandingan Kasus Meninggal Dunia dengan Total Kasus *COVID-19* di Indonesia

No	Provinsi	Kasus	No	Provinsi	Kasus
1	Jawa Timur	0,0065	18	Kalimantan Tengah	0,0003
2	Jawa Tengah	0,0050	19	Nusa Tenggara Barat	0,0002
3	DKI Jakarta	0,0041	20	Nusa Tenggara Timur	0,0002
4	Jawa Barat	0,0023	21	Sulawesi Tengah	0,0002
5	Kalimantan Timur	0,0010	22	Kalimantan Utara	0,0002
6	Bali	0,0008	23	Kepulauan Bangka Belitung	0,0001
7	Banten	0,0007	24	Sulawesi Tenggara	0,0001
8	Riau	0,0007	25	Papua	0,0001
9	Sumatera Selatan	0,0006	26	Kepulauan Riau	0,0001
10	DI Yogyakarta	0,0006	27	Bengkulu	0,0001
11	Sumatera Utara	0,0006	28	Gorontalo	0,0001
12	Kalimantan Selatan	0,0006	29	Papua Barat	0,0001
13	Sulawesi Selatan	0,0006	30	Jambi	0,0001
14	Sumatera Barat	0,0005	31	Maluku Utara	0,0001
15	Lampung	0,0005	32	Sulawesi Barat	0,0001
16	Sulawesi Utara	0,0003	33	Maluku	0,0001
17	Aceh	0,0003	34	Kalimantan Barat	0,0000

Sumber: Komite Penanganan *COVID-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021

Dasar dari penelitian memilih Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah yang akan dianalisis selain dikarenakan lebih dari 49 juta atau 18,34% dari penduduk Indonesia terkonsentrasi di provinsi ini ialah, angka kasus di Provinsi Jawa Barat yang masih terus menunjukkan pertambahan. Pada gambar 1.1 akan memberikan sekilas gambaran dari perkembangan kasus *COVID-19* setiap bulan sejak awal virus terkonfirmasi di Indonesia yakni bulan Maret 2020 sampai dengan April 2021. Angka yang digunakan sebagai perbandingan ialah tingkat kasus yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan angka tertinggi kasus *COVID-19* dan Provinsi Jawa Barat yang akan

dianalisis. Sekilas hasil perbandingan perkembangan kasus di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat menunjukkan apabila Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan maka hal yang sama juga dialami Provinsi Jawa Barat, namun pada April 2021 Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya kenaikan tingkat kasus sedangkan di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan penurunan tingkat kasus *COVID-19*.



Sumber: Pusat Informasi dan Koordinasi *COVID-19* Jawa Barat & Data Pemantauan *COVID-19* DKI Jakarta, 2021

Gambar 1.1
Perkembangan Kasus *COVID-19* di DKI Jakarta dan Jawa Barat

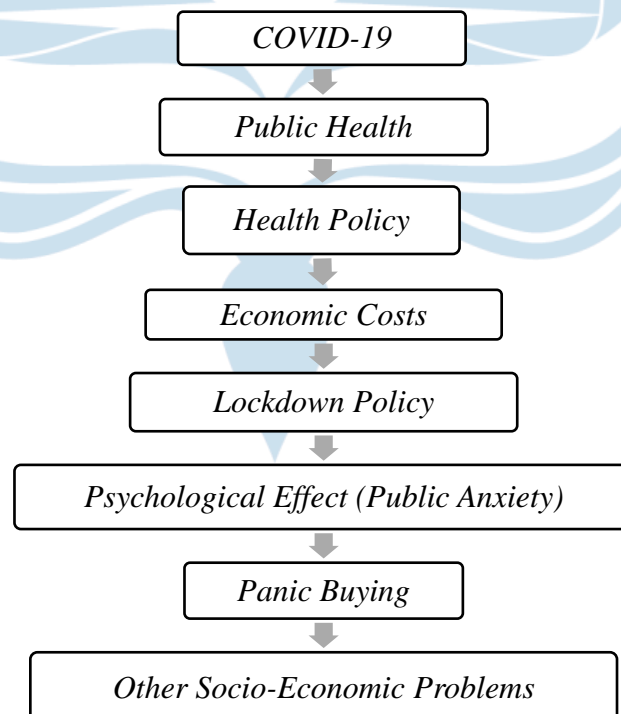
Selain dari perbandingan perkembangan kasus *COVID-19* di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, dapat diperhatikan pada Tabel 1.4 perbandingan angka prevalensi setiap provinsinya. Prevalensi merupakan proporsi dari populasi yang memiliki kriteria tertentu, dalam penelitian ini merupakan proporsi masyarakat yang terdeteksi positif *COVID-19* (Google Arts & Culture, 2021). Tabel 1.4 menunjukkan meski Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat 2 dengan tingkat kasus tertinggi, namun angka prevalensi masih jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan provinsi dengan tingkat kasus tertinggi.

Tabel 1.4
Prevalensi Berdasarkan Tingkat Kasus Tertinggi, Maret 2020 - April 2021

Provinsi	Total Penduduk	Kasus	Prevalensi
DKI Jakarta	10.576.400	406.205,00	38,41
Jawa Barat	49.565.200	277.553,00	5,60
Jawa Tengah	34.738.200	183.027,00	5,27
Jawa Timur	39.955.900	146.808,00	3,67
Kalimantan Timur	3.664.700	68.136,00	18,59
Sulawesi Selatan	8.888.800	61.419,00	6,91
Banten	12.895.300	47.101,00	3,65
Riau	6.951.200	44.236,00	6,36
Bali	4.414.400	42.698,00	9,67
DI Yogyakarta	3.919.200	38.703,00	9,88
Sumatera Barat	5.545.700	36.268,00	6,54
Kalimantan Selatan	4.268.600	32.612,00	7,64
Sumatera Utara	14.798.400	29.198,00	1,97
Sumatera Selatan	8.600.800	20.308,00	2,36
Kalimantan Tengah	2.686.300	20.068,00	7,47
Papua	3.393.100	19.780,00	5,83
Lampung	8.534.800	15.702,00	1,84
Sulawesi Utara	2.512.900	15.638,00	6,22
Nusa Tenggara Timur	5.513.400	14.200,00	2,58
Kepulauan Bangka Belitung	1.469.800	12.822,00	8,72
Sulawesi Tengah	3.081.700	12.125,00	3,93
Kalimantan Utara	708.400	11.702,00	16,52
Kepulauan Riau	2.309.500	10.838,00	4,69
Aceh	5.388.100	10.814,00	2,01
Nusa Tenggara Barat	5.225.900	10.396,00	1,99
Sulawesi Tenggara	2.703.500	10.291,00	3,81
Papua Barat	986.000	8.879,00	9,01
Kalimantan Barat	5.104.900	7.515,00	1,47
Jambi	3.604.200	7.503,00	2,08
Maluku	1.787.100	7.407,00	4,14
Bengkulu	1.994.300	6.630,00	3,32
Sulawesi Barat	1.378.100	5.443,00	3,95
Gorontalo	1.186.300	5.355,00	4,51
Maluku Utara	1.252.300	4.414,00	3,52

Sumber: Badan Pusat Statistik & Komite Penanganan *COVID-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021

Seperti yang telah diketahui bahwa *COVID-19* menyerang kesehatan tubuh dari yang terinfeksi, sehingga dapat dikatakan kesehatan publik merupakan permasalahan utama. Namun, pandemi bukan sekedar menyangkut masalah kesehatan masyarakat melainkan pemicu awal munculnya bencana krisis ekonomi dan politik di negara-negara yang terinfeksi (Bartik *et al.*, 2020). Selanjutnya Faura (2020) dalam studi mengenai *behavioral economics* memberikan ulasan yang mengatakan bahwa publik atau masyarakat merupakan agen ekonomi, sehingga *COVID-19* bukan hanya menjadi permasalahan dalam sektor kesehatan publik tetapi juga berdampak kepada sektor lainnya seperti sektor sosial dan ekonomi. Pada gambar 1.2 Prawoto *et al.*, (2020) dengan mengutip beberapa studi terdahulu menyimpulkan beberapa hal yang timbul disebabkan pandemi *COVID-19* dalam aspek ekonomi dan sosial.



Sumber: Prawoto *et al.*, 2020

Gambar 1.2
Dampak Kasus *COVID-19*

Berdasarkan gambar 1.2 disimpulkan bahwa semenjak pandemi *COVID-19* ini berlangsung, banyak hal yang terjadi dan saling mempengaruhi yang menyebabkan beberapa perubahan termasuk tatanan setiap sektor yang ada. Dengan fakta masyarakat merupakan agen atau pelaku dari setiap interaksi sosial, ekonomi sampai dengan politik, serta *COVID-19* yang pada dasarnya menyerang sistem kesehatan masyarakat. Maka seminim apapun interaksi yang terjadi akan membawa perubahan pada struktur yang ada, dikarenakan masyarakat sedang mengalami gangguan, dalam hal ini gangguan tersebut berupa gangguan kesehatan yang disebabkan oleh *COVID-19*. Selain dari perkembangan kasus *COVID-19* di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, hal lain yang menjadi dasar memilih Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah yang akan diteliti ialah tingkat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Perbandingan PDRB Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat pada Tabel 1.5 menunjukkan meskipun Provinsi Jawa Barat bukanlah daerah ibu kota, pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat hampir sama besar dengan PDRB yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta. Selain itu dengan membandingkan persentase pertumbuhan PDRB kedua provinsi tersebut pada tahun 2020 dengan persentase pertumbuhan sebelumnya yakni pada tahun 2019, PDRB Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 7,51% sedangkan PDRB Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan hingga 8,18%. Disimpulkan meskipun persentase pertumbuhan PDRB setiap tahunnya DKI Jakarta unggul dibandingkan Jawa Barat, namun pada akhir tahun 2020 saat terjadinya pandemi penurunan pertumbuhan yang dialami PDRB Provinsi Jawa Barat tidak lebih besar dibandingkan penurunan yang dialami Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.5
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta
2015-2020 (persen)

Tahun	Jawa Barat	DKI Jakarta
2015	5,05	5,91
2016	5,66	5,87
2017	5,35	6,20
2018	5,64	6,11
2019	5,07	5,82
2020	-2,44	-2,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat & DKI Jakarta, 2020

Perubahan oleh gangguan yang disebabkan oleh pandemi *COVID-19* ini menuntun pada pergeseran sektoral. Pergeseran sektoral diartikan sebagai transformasi baik dalam bentuk fisik maupun kebiasaan atau cara melakukan kegiatan produksi ekonomi. Berdasarkan pengertian ekonomi maka perubahan atau pergeseran sektoral ini merupakan pengaturan aktivitas produktif yang berbeda dalam perekonomian dan distribusi yang berbeda faktor produksinya seperti pekerjaan, wilayah geografis, dan jenis produk (Arham, 2014). Salah satunya adalah perubahan yang mulanya mengandalkan sektor sekunder atau industri, berubah menjadi lebih mengandalkan sektor primer atau pertanian atau sebaliknya. Pergeseran dapat diartikan juga dengan peran dari masing-masing sektor ekonomi mengalami perubahan, ada yang mengalami peningkatan, ada yang mengalami penurunan dan ada juga sektor yang tidak mengalami perubahan atau tetap.

Perubahan dari peran masing-masing sektor diukur dengan berbagai cara, salah satunya yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah perbandingan tingkat PDRB sektoral dengan total PDRB di Provinsi Jawa Barat. Berikut Tabel 1.6 merupakan sekilas laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha yang sudah spesifikasi hanya pada sektor jasa di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 dan 2020.

Pada Tabel 1.6 pandemi *COVID-19* secara resmi masuk ke Indonesia yakni awal tahun 2020, sehingga untuk melihat sekilas perubahan atau pergeseran akan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2019. Dengan menggunakan data PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan yakni tahun dasar 2010, maka didapatkan hasil 8 dari 9 sektor jasa mengalami penurunan dan hanya 1 sektor yang menunjukkan peningkatan yakni sektor pendidikan.

Tabel 1.6
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Sektor Jasa di
Provinsi Jawa Barat, 2019-2020 (persen)

Sektor	2019	2020
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,51	-7,94
Transportasi dan Pergudangan	4,97	-4,18
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,25	-5,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,20	1,15
<i>Real Estate</i>	9,52	1,92
Jasa Perusahaan	9,16	-18,38
Jasa Pendidikan	5,19	6,69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,48	-5,39
Jasa lainnya	7,14	-2,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021

Maka tujuan dari dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui lebih dalam perubahan struktur berupa pergeseran sektoral yang terjadi di Provinsi Jawa Barat selama pandemi *COVID-19*. Karena peningkatan atau penurunan yang terjadi dalam perekonomian menyebabkan terjadinya perubahan dari setiap peran sektoral yang berujung pada perubahan struktur ekonomi. Untuk melihat arah kecenderungan dari struktur ekonomi di Provinsi Jawa Barat, maka perlu diketahui terkait peranan dari setiap sektor dalam PDRB di Provinsi Jawa Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini ialah bagaimana pergeseran sektoral di Provinsi Jawa Barat selama pandemi *COVID-19*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis pergeseran sektoral selama pandemi *COVID-19* di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- 1) Pemerintah, penelitian dapat berfungsi sebagai salah satu bahan referensi dalam membuat kebijakan khususnya di Provinsi Jawa Barat.
- 2) Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta membuka wawasan pembaca untuk mengetahui pergeseran sektoral di Provinsi Jawa Barat selama pandemi *COVID-19*.
- 3) Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi serta pembanding studi/penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan konsep dan atau teori yang relevan dengan permasalahan penelitian yakni, landasan teori dan kerangka penelitian.

Dalam bab ini juga disajikan studi terkait/penelitian terdahulu yang diacu dalam penelitian untuk skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan hal mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, alat analisis, dan definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang bersifat terpadu dalam hal ini berupa data variabel penelitian, analisis deskriptif variabel penelitian serta hasil analisis terkait pergeseran variabel penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.